

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Tunjangan ASN DKI Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS — Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta mengevaluasi penurunan tunjangan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, prioritas keuangan di masa pandemi Covid-19 ini adalah untuk pembiayaan guna memutus penularan virus korona baru dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Demikian dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Rabu (27/5/2020). Ia mengatakan, tunjangan ASN di dinas dan lembaga di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikurangi 53 persen. Persentase ini sesuai kontraksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang juga berkurang drastis akibat lesunya kegiatan ekonomi.

"Hanya tunjangan yang dikurangi. Gaji pokok tetap," kata Chaidir.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya dan surat keputusan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, tunjangan untuk ASN bisa naik dan turun. Hal ini tergantung pada fluktuasi APBD ataupun APBN. Tunjangan bisa dihapus jika neraca keuangan nasional ataupun daerah tidak memadai.

"Insentif atau tunjangan dihitung dari kinerja ASN dan risiko yang muncul dari pekerjaan tersebut. Jumlah ini diolah dengan keadaan anggaran pemerintah daerah. Saat ini faktor utama ialah kontraksi anggaran," ujarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN, jumlah gaji pokok pegawai baru di golongan I-A (paling rendah) adalah Rp 1.560.800 per bulan. Adapun untuk ASN golongan IV-E yang tertinggi adalah Rp 3.593.100. Jumlah ini belum mencakup tunjangan kinerja daerah dan

Insentif atau tunjangan dihitung dari kinerja ASN dan risiko yang muncul dari pekerjaan tersebut.

tunjangan hari raya.

Sebagai gambaran, Pergub DKI Jakarta Nomor 409 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) menjelaskan, calon PNS mendapat TKD terendah, yakni Rp 4.860.000. Pegawai dengan pangkat pelayanan terampil mendapatkan Rp 7.470.000. Paling tinggi adalah teknis ahli dengan TKD Rp 19.710.000.

Awal Mei, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengakibatkan banyak industri dan usaha yang ditutup sementara demi mencegah penularan Covid-19. Hanya 11 sektor strategis yang tetap boleh beroperasi. Dampak negatifnya ialah, pemasukan dari pajak dan retribusi berkurang.

Anggaran yang tersisa digunakan untuk pembiayaan penanggulangan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial kepada warga Jakarta yang miskin dan rentan menjadi miskin. Untuk bantuan ini, Pemprov DKI Jakarta mengaku kepayahan sehingga meminta tahap kedua pemberian bansos ditalangi Kementerian Sosial.

Perubahan perilaku

Sosiolog perkotaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fadjar Thufail, mengingatkan pemerintah bahwa pemotongan tunjangan, walau merupakan langkah yang benar secara perhitungan keuangan di masa pandemi, juga mendatangkan perubahan perilaku masyarakat. Ia memaparkan bahwa ASN di Jakarta memiliki tunjangan tertinggi

se-Indonesia.

Tunjangan yang didapat aparatur sipil di Pemprov Jakarta minimal setara dengan satu kali gaji pokok dan gaji pokok itu sendiri termasuk yang paling tinggi secara nasional. Apabila dikurangi 53 persen tidak akan membuat penerimanya masuk ke dalam kategori rentan miskin.

Namun, pemotongan tunjangan tetap harus mengantisipasi perubahan perilaku para penerimanya. Perubahan ini harus dijadikan pertimbangan dalam menyusun manajemen risiko bencana di masa pandemi. Pemotongan tunjangan mengakibatkan pola konsumsi rumah tangga yang harus berhemat. Dari sebelumnya biasa belanja di mal, sekarang bisa beralih belanja ke pasar tradisional.

"Padahal, penerapan PSBB di pasar tradisional masih bermasalah karena, baik penjual maupun pembeli masih banyak tidak menerapkan protokol kesehatan," ujar Fadjar.

Harus diperhitungkan pula pola penghematan rumah tangga ASN dengan tidak mengendarai kendaraan pribadi, tetapi memakai angkutan umum. Hal ini memperbesar risiko penularan Covid-19.

"Pandemi juga menyangkut masalah sosiologis, tak hanya epidemiologis karena sangat bergantung pada persepsi masyarakat mengenai kehidupan. Warga menginginkan bahan pokok yang terjangkau dan tidak gentar menempuh jarak lebih jauh demi mendapatkannya," tutur Fadjar.

Menurut dia, mengantisipasi penurunan pendapatan masyarakat di semua sektor tidak hanya pada kelompok miskin dan rentan miskin. Pergerakan masyarakat kelas menengah bawah juga penting. Keberadaan warung-warung di wilayah permukiman harus dijamin tetap dibuka selama PSBB dengan mengikuti protokol kesehatan agar masyarakat tidak perlu pergi jauh dan terpapar risiko keramaian. (DNE)